

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Landasan Teoritis

2.1.1. Teori Ekonomi Politik Keynesian

Pendekatan Keynesian memajukan sejenis klaim untuk pengaturan sendiri pasar yang umum di antara para pemikir klasik dan neoklasik. Kritik Keynesian mempertanyakan klaim bahwa sistem pasar yang tidak diatur akan sepenuhnya mengeksploitasi potensi produktif masyarakat. Pasar yang mengatur dirinya sendiri tidak dapat diandalkan untuk mengamankan mata pencaharian mereka yang bergantung padanya, atau untuk menerjemahkan keinginan masyarakat untuk menabung ke dalam pembentukan modal yang dibutuhkan agar tabungan itu berbuah di masa depan. Teori Keynesian pada argumennya terhadap konsep pasar meyakini bahwa sistem pasar akan mempertemukan orang yang memiliki permintaan dengan orang yang memiliki pasokan sedemikian rupa sehingga kebutuhan dari semua orang akan terpenuhi seoptimal mungkin berdasarkan sumber daya yang ada. Yang lebih merusak lagi adalah implikasi bahwa dalam bidang-bidang krusial pengejaran kepentingan pribadi bahkan ketika didasarkan pada kalkulus tujuan-tujuan yang masuk akal akan sering merugikan diri sendiri. Upaya pekerja untuk meningkatkan permintaan tenaga kerja dapat menyebabkan tingkat pekerjaan

yang lebih rendah; Upaya masyarakat untuk menabung lebih banyak dapat menyebabkan berkurangnya tabungan dan investasi. Kesimpulan ini membantu meletakkan dasar bagi intervensi negara dan dengan demikian membantu untuk mendefinisikan peran negara dalam kaitannya dengan ekonomi. Negara bekerja untuk mengamankan kondisi makroekonomi yang dibutuhkan agar pengejaran kepentingan pribadi tidak menimbulkan efek yang merugikan. Kebijakan stabilisasi pemerintah berfokus terutama pada kondisi sistemik di tiga bidang: (a) permintaan agregat, (b) sektor keuangan, dan (c) harga.

Dalam pengertian ini, ketidakstabilan ekonomi kapitalis menimbulkan keraguan pada hipotesis tangan tak terlihat dan oleh karena itu juga pada implikasi hipotesis tersebut terhadap ekonomi politik. Ini mengarah pada argumen yang mendukung kebijakan pemerintah yang bertujuan untuk memastikan proses reproduksi yang stabil dan tingkat ketenagakerjaan yang memadai. Gagal memanfaatkan sepenuhnya sumber daya dan materi manusia yang tersedia untuknya. Kegagalan ini menyiratkan biaya yang tinggi dalam istilah manusia akibat tingginya tingkat pengangguran. Ekonom yang bekerja dalam tradisi Keynesian menerima argumen bahwa ekonomi kapitalis, jika dibiarkan sendiri, tidak akan menggunakan sepenuhnya sumber daya yang tersedia bagi mereka. Kegagalan ini membutuhkan intervensi pemerintah. Tujuan menstabilkan ekonomi perusahaan swasta, beberapa ekonom mencoba memperlakukan metode stabilisasi sebagai "alat". Proses politik dan penilaian

politik tidak perlu berperan. Stabilisasi adalah masalah teknis yang paling baik diserahkan kepada mereka yang memiliki pengetahuan yang sesuai

Kesimpulan-kesimpulan dari argumen Keynesian ini membawa kepada kesimpulan berikutnya yaitu bahwa perlu ada intervensi dari negara untuk membantu mendefinisikan peran dari negara dalam hubungannya dengan perekonomian. Negara bertindak untuk mewujudkan kondisi makroekonomi yang diperlukan untuk agar upaya individu-individu untuk mengejar kepentingan pribadinya sendiri tidak membawa dampak yang negatif.⁵ Kebijakan stabilisasi yang dapat dilakukan negara difokuskan terutama pada kondisi-kondisi sistemik dalam tiga bidang: (a) permintaan agregat, (b) sektor finansial, dan (c) harga. Ketika stabilisasi di asumsikan memang perlu dilakukan terhadap perekonomian swasta.⁶

⁵ Caporso, James A dan Levine, David P. *Teori-teori ekonomi politik*, Pustaka pelajar, Yogyakarta. 2008.

⁶ Caporso, James A dan Levine, David P. *Teori-teori ekonomi politik*, Pustaka pelajar, Yogyakarta. 2008

2.2. Studi Kemitraan

2.2.1. Pengertian Kemitraan

Kemitraan sesungguhnya merupakan sebuah kebutuhan bagi para pihak dengan kesamaan orientasi yang ingin menghemat energi dan menghasilkan manfaat yang berlipat ganda⁷

Kemitraan dilihat dari perspektif etimologis diadaptasi dari kata *partnership* dan berakar dari kata *partner*. *Partner* dapat diterjemahkan sebagai pasangan, jodoh, sekutu, kompanyon, sedangkan *partnership* diterjemahkan sebagai persekutuan atau perkongsian.

Berdasarkan terjemahan dari asal katanya, kemitraan dapat dimaknai sebagai suatu bentuk persekutuan antara dua pihak atau lebih yang membentuk suatu ikatan kerjasama atas dasar kesepakatan dan rasa saling membutuhkan. Kerjasama tersebut terjalin dalam rangka meningkatkan kapasitas dan kapabilitas di suatu bidang usaha tertentu, atau tujuan tertentu, sehingga dapat memperoleh hasil yang lebih baik. Menurut Ketentuan Umum Peraturan Pemerintah Nomor. 44 Tahun 1997 terutama dalam Pasal 1 menyatakan bahwa: “Kemitraan adalah kerjasama usaha antara Usaha Kecil dengan Usaha Menengah dan atau dengan Usaha Besar disertai pembinaan dan pengembangan oleh Usaha Menengah dan atau Usaha Besar dengan

⁷ Sulistiyani, Ambar Teguh. *Kemitraan dan model-model pemberdayaan*, Gava Media, Yogyakarta. 2017.

memperhatikan prinsip saling memerlukan, saling memperkuat dan saling menguntungkan.”

Peran tiga faktor, antara pemerintah, swasta, dan masyarakat dirancang untuk berkontribusi. Rancangan peran tiga aktor tersebut tampak pada tabel 2.1. sebagai berikut.⁸

Tabel 2.1

Peran Tiga Aktor dalam pemberdayaan masyarakat

Aktor	Peran dalam pemberdayaan	Bentuk Output Peran	Fasilitasi
Pemerintah	Formulasi dan penetapan Policy, Implementasi Monitoring dan evaluasi Media.	Kebijakan : Politik, Umum, Khusus/Departemental/ Sektoral Penganggaran, Juknis dan Juklak, penetapan indikator keberhasilan Peraturan hukum, penyelesaian sengketa.	Dana, jaminan, alat, teknologi, network, sistem manajemen informasi, edukasi

⁸ Sulistiyani, Ambar Teguh. *Kemitraan dan model-model pemberdayaan*, Gava Media, Yogyakarta. 2017.

Swasta	Kontribusi pada formulasi implementasi, monitoring dan evaluasi.	Konsultasi & Rekomendasi kebijakan, tindakan dan langkah/policy action implementasi, donator, private investment pemeliharaan	Dana, alat, teknologi, tenaga ahli dan sangat terampil
Masyarakat	Partisipasi dalam formulasi, implementasi, monitoring dan evaluasi	Saran, input, kritik, rekomendasi, keberatan, dukungan dalam formulasi kebijakan. Policy action, dana swadaya menjadi obyek, partisipan, pelaku utama/ subyek Menghidupkan fungsi sosial kontrol.	Tenaga terdidik, tenaga terlatih, setengah terdidik dan setengah terlatih.

Berdasarkan pemetaan peran tiga aktor dalam tabel diatas, pemerintah lebih banyak berperan pada penentuan rambu-rambu dan aturan main secara umum. Peran pemerintah yang paling menonjol terletak pada peran pengambilan keputusan dan pendanaan. Sedangkan swasta itu sendiri berperan sebagai implementasi atau pelaksana.

Berdasarkan beberapa pengertian diatas maka dapat disimpulkan bahwa kemitraan adalah proses interaksi dua pihak atau lebih yang diwujudkan dalam

bentuk kerjasama. Pihak-pihak yang melakukan kemitraan meliputi berbagai sektor seperti kelompok masyarakat, lembaga pemerintah dan lembaga non-pemerintah. Beberapa pihak ini bekerja sama untuk mencapai tujuan bersama berdasarkan atas kesepakatan, prinsip, dan peran masing-masing.

2.1.1.2 Prinsip-prinsip Kemitraan

Dalam melakukan kemitraan, terdapat prinsip-prinsip yang harus dipahami oleh anggota kemitraan. Prinsip-prinsip kemitraan perlu dipahami karena prinsip ini yang melandasi terjalannya suatu pola kemitraan yang baik.

Terdapat prinsip-prinsip yang perlu dipahami dalam menjalin sebuah yakni:

a. Kesetaraan

Setiap mitra dalam melaksanakan pembangunan kesehatan harus diberi kepercayaan penuh, dihargai, dihormati, dan diberikan pengakuan dalam hal kemampuan dan nilai-nilai yang dimiliki.

b. Keterbukaan

Setiap mitra dalam melaksanakan pembangunan kesehatan yakin dan percaya setiap perjanjian akan dilakukan dengan terbuka, jujur, tidak saling merahasiakan sesuatu.

c. Saling menguntungkan

Setiap mitra dalam melaksanakan pembangunan kesehatan akan mendapatkan keuntungan dan manfaat bersama dari kemitraan tersebut.

Bentuk kerangka kerja konseptual menggunakan pendekatan CIPOO (context-input-process-dan output-outcome).⁹

- a. Context, yaitu konteks pemberdayaan agen pemberharu menjelaskan program atau kegiatan yang sesuai untuk dikembangkan dalam rangka pemberdayaan agen pemberharu.
- b. Input, akan menggambarkan sumber daya, fasilitas yang diperlukan dalam memberdayakan agen pemberharu.
- c. Process, menggambarkan serangkaian langkah atau tindakan yang ditempuh untuk memberdayakan agen pemberharu.
- d. Output, adalah hasil akhir setelah serangkaian proses pemberdayaan dilakukan akan mencapai kompetensi sebagai agen pemberharu yang berdaya dan mampu implementasi pendampingan kepada masyarakat untuk melakukan program aksi dari perencanaan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi program pemberdayaan masyarakat miskin.
- e. Outcome, adalah nilai manfaat yang ditimbulkan setelah agen pemberharu mampu bertindak sebagai agen pemberharu dengan melakukan “peran” dalam proses pemberdayaan masyarakat miskin, yaitu dengan tingkat peran linear atau berbanding lurus dengan tingkat keberdayaan yang sudah dimiliki tersebut.

⁹ Sulistiyani, Ambar Teguh. *Kemitraan dan model-model pemberdayaan*, Gava Media, Yogyakarta. 2017.

Tabel 2.2

Pendekatan CIPOO untuk pemberdayaan

Context Pemberdayaan Evaluasi kondisi riil agen pemberharu	Input: nilai-nilai positif dari faktor internal dan eksternal	Proses Pemberdayaan: langkah- langkah pemberdayaan	Output: tingkat keberdayaan	Outcome: Manfaat eksternal: Mitra kerja
Kekuatan kelembagaan	Struktur efisien dan lentur dan menganut sistem terbuka Potensi kepemimpinan/manajemen visioner Ketersediaan sumberdaya yang memadai	Pemberdayaan kelembagaan dengan pendekatan capacity building	Organisasi agen pemberharu establish	Pdp I: Komentator -evaluator (outsider dari program pemberdayaan)
Kemampuan manajerial	Aksesibilitas terhadap program-program pengentasan kemiskinan yang bersumber pada agen pemberharu pemerintah, donor lain	Pemberdayaan kemampuan manajerial dengan <i>new public management</i>	Organisasi & Manajemen program efisien	Pdp II: Implementor program pemberdayaan

Tingkat kinerja	Kemampuan untuk mencapai efisiensi, efektivitas, produktivitas, akuntabilitas dan kualitas pelayanan	Peningkatan kinerja	Kinerja agen pembaharu & program tinggi	Pdp III: Monitor, advokasi program pemberdayaan
<i>Knowledge, Attitude, Practice</i> (KAP)	Kemampuan mengenali stakeholder dan mampu membangun jaringan kerja eksternal.	Peningkatan wawasan pengetahuan, sikap sadar-peduli, kecakapan & keterampilan	Agen pembaharu yang professional	PdpIV: perencanaan evaluator

2.1.1.3 Model-model, Bentuk, dan Sifat Kemitraan

Model-model kemitraan dikembangkan berdasarkan pengamatan yang dilakukan dalam hubungan kerjasama antar organisasi. Menurut Sulistiyani (2004:130) terdapat 3 model kemitraan yang mampu menggambarkan hubungan antarorganisasi, yakni :

1) Pseudo partnership, atau kemitraan semu

Kemitraan semu adalah merupakan sebuah persekutuan yang terjadi antara dua pihak atau lebih, namun tidak sesungguhnya melakukan kerjasama secara seimbang satu dengan yang lainnya. Bahkan pada suatu pihak belum tentu memahami secara benar akan makna sebuah persekutuan yang dilakukan, dan untuk tujuan apa itu semua serta disepakati. Ada suatu yang unik dalam kemitraan semacam ini, bahwa kedua belah pihak atau lebih sama-sama merasa penting untuk melakukan kerjasama, akan tetapi pihak-pihak yang bermitra belum tentu memahami substansi yang diperjuangkan dan manfaatnya apa.

2) Mutualism partnership, atau kemitraan mutualistik.

Kemitraan mutualistik adalah merupakan persekutuan dua pihak atau lebih yang sama-sama menyadari aspek pentingnya melakukan kemitraan, yaitu untuk saling memberikan manfaat dan mendapatkan manfaat lebih, sehingga akan dapat mencapai tujuan secara optimal.

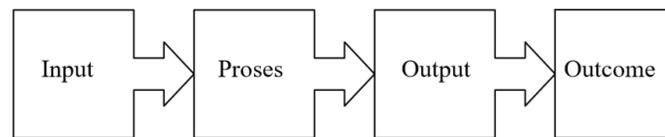
3) Conjugation partnership, atau kemitraan melalui peleburan dan pengembangan.

Kemitraan konjugasi adalah kemitraan untuk mendapatkan energi dan kemudian terpisah satu sama lain, dan selanjutnya dapat melakukan pembelahan diri. Maka organisasi, agen-agen, kelompok-kelompok atau perorangan yang memiliki kelemahan di dalam melakukan usaha atau mencapai tujuan organisasi dapat melakukan kemitraan model ini. Dua pihak atau lebih dapat melakukan konjugasi dalam rangka meningkatkan kemampuan masing-masing.

Lebih lanjut dalam membahas model-model kemitraan yang terjalin antarorganisasi, bentuk kemitraan yang sudah disepakati kemudian dituangkan dalam SK bersama, MOU, Pokja, Forum Komunikasi dan Kontrak Kerja/Perjanjian kerja (Ditjen P2L & PM dalam Kuswidanti, 2008:16). Adapun kemitraan yang terjalin antarorganisasi mempunyai sifat yang berbeda-beda. Dikutip dari sumber yang sama, sifat kemitraan ada 3 yakni : Insidental, Jangka Pendek dan Jangka Panjang. Sifat kemitraan Insidental berarti kemitraan karena kebutuhan sesaat. Jangka pendek berarti kemitraan yang terjalin merupakan pelaksanaan proyek dalam kurun waktu tertentu. Sedangkan sifat kemitraan jangka panjang berarti kemitraan yang dijalin karena pelaksanaan suatu program tertentu.

2.1.1.4 Indikator Keberhasilan Kemitraan

Untuk dapat mengetahui keberhasilan pengembangan kemitraan diperlukan adanya indikator yang dapat diukur. Dalam penentuan indikator sebaiknya dipahami prinsip-prinsip indikator yaitu : spesifik, dapat diukur, dapat dicapai, realistis, dan tepat waktu. Sedangkan pengembangan indikator melalui pendekatan program menurut Ditjen P2L & PM dalam Kuswidanti (2008:22) dijelaskan sebagai berikut:



Gambar 1. Indikator Keberhasilan Kemitraan

1) Indikator input

Tolok ukur keberhasilan input dapat diukur dari tiga indikator, yaitu:

- a) Terbentuknya tim wadah atau sekretariat yang ditandai dengan adanya kesepakatan bersama dalam kemitraan.
- b) Adanya sumber dana/biaya yang memang diperuntukkan bagi pengembangan kemitraan.
- c) Adanya dokumen perencanaan yang telah disepakati oleh institusi terkait.

Hasil evaluasi terhadap input dinilai berhasil apabila ketiga tolok ukur tersebut terbukti ada.

2) Indikator proses

Tolak ukur keberhasilan proses dapat diukur dari indikator sebagai frekuensi dan kualitas pertemuan tim atau sesuai kebutuhan. Hasil evaluasi terhadap proses nilai berhasil, apabila tolok ukur tersebut terbukti adanya yang dilengkapi dengan agenda pertemuan, daftar hadir dan notulen hasil pertemuan.

3) Indikator output

Tolak ukur keberhasilan output dapat diukur dari indikator sebagai berikut: jumlah kegiatan yang dikerjakan oleh institusi terkait sesuai dengan kesepakatan peran masing-masing institusi. Hasil evaluasi terhadap output dinilai berhasil, apabila tolok ukur tersebut diatas terbukti ada.

4) Indikator Outcome

Tolak ukur keberhasilan outcome adalah menurunnya angka permasalahan yang terjadi.

2.1.1.5 Interaksi Antar Aktor

Membahas mengenai interaksi antar aktor berarti secara tidak langsung menyangkut pembahasan mengenai konsep good governance (tata pemerintahan yang baik) yang mana dalam pembahasan good governance dijelaskan bagaimana hubungan antar aktor yakni pemerintah, swasta dan masyarakat. Senada dengan hal itu, Thoha dalam Sulistiyani (2004:76) menjelaskan:

“Good governance adalah tata pemerintahan yang baik yang merupakan suatu kondisi yang menjamin adanya proses kesejajaran, kesamaan, kohesi, dan keseimbangan peran serta, adanya saling mengontrol yang dilakukan oleh komponen yakni pemerintah (government), rakyat (citizen atau civil society) dan usahawan (business) yang berada di sektor swasta.”

Adapun dalam mewujudkan good governance harus didasarkan pada prinsip-prinsip yang ada. Menurut UNDP (United Nation Development Program) dalam Dwiyanto (2008:79) Good Governance memiliki delapan prinsip yakni partisipasi, transparansi, akuntabel, efektif dan efisien, kepastian hukum, responsif, konsensus, setara dan inklusif.

Interaksi antar aktor dalam good governance dapat terjalin karena masing-masing aktor mempunyai peran yang berbeda. Perbedaan peran pemerintah, swasta dan masyarakat menjadikan satu sama lain saling membutuhkan dan saling melengkapi. Berikut adalah peran masing-masing aktor dalam good governance dan gambaran interaksinya menurut Pipin Hanapiah negara atau pemerintah berperan dalam:

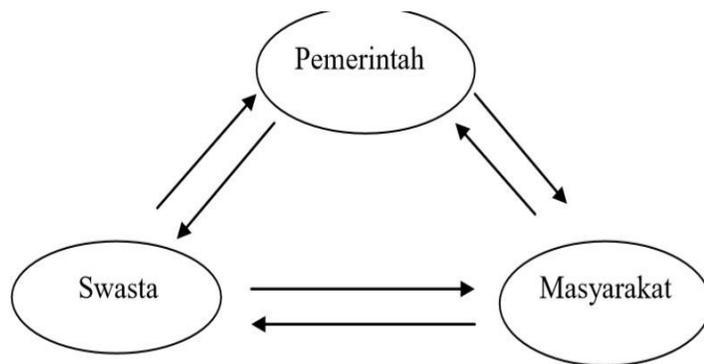
- 1) Regulasi/pembuatan kebijakan publik;
- 2) Pengendalian dan pengawasan publik;
- 3) Perlindungan dan pengayoman masyarakat dan swasta;
- 4) Fasilitasi kepentingan negara dan publik;
- 5) Pelayanan kepentingan publik.

Sedangkan Swasta atau Dunia Usaha, berperan dalam hal:

- 1) Penggerakan aktivitas di bidang ekonomi;
- 2) Penyelenggaraan usaha-usaha kesejahteraan bangsa;
- 3) Penyelenggaraan usaha-usaha perindustrian dan perdagangan;
- 4) Penyelenggaraan lapangan pekerjaan bagi masyarakat.

Dan masyarakat, berperan dalam hal:

- 1) Posisinya sebagai subjek sekaligus objek (partisipator) bagi penyelenggaraan urusan-urusan yang dilakukan oleh Negara/Pemerintah dan Swasta;
- 2) Pengontrol terhadap kinerja Pemerintah dan Swasta.



Gambar 2. Interaksi Antar Aktor

Dari penjelasan interaksi antar aktor di atas, dapat diambil pengertian bahwa interaksi antar aktor muncul berdasarkan adanya konsep good governance. Interaksi dapat terjalin karena masing-masing aktor dalam good

governance mempunyai peran yang berbeda-beda, saling membutuhkan satu sama lain dan bisa saling melengkapi.

2.2.1 Pendekatan Pilihan Publik

Dalam ilmu politik pada umumnya, dikenal nama pendekatan pilihan rasional (*rational choice approach*), sementara itu juga ada beberapa nama lain seperti pilihan publik (*public choice*) dan *collective choice*. Variasi analisis ini telah mengembangkan satu bidang ilmu politik tersendiri, yaitu Ekonomi Politik (*political economi*) salah satu tokoh analisisnya yang peneliti gunakan adalah pemikiran James Buchanan.¹⁰ Teori ini peneliti gunakan untuk mempertajam analisis penelitian keilmuan politik penulis sehingga dalam penelitian ini penulis menggunakan pendekatan Pilihan Publik. Pilihan Publik lebih memusatkan perhatian pada pendekatan untuk melakukan reformasi yang timbul dari perspektif kekuasaan. Teori ini sebagai jembatan antara keilmuan ekonomi dengan keilmuan politik yang selama ini berkembang secara terpisah satu sama lain. Pendekatan pilihan publik pengambilan keputusan secara bersama-sama/kolektif yang dilihat dari perspektif ekonomi untuk menjelaskan fenomena social-politik. Unsur penting dalam teori pilihan publik yang

¹⁰ Miriam, Budiardjo. *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, Gramedia, Jakarta, 2017

harus diperhatikan yaitu *supply-demand* (pertukaran) dan aspek kelembagaan. James Buchanan merupakan salah satu ahli ekonomi yang mengembangkan teori pilihan publik. Menurut James Buchanan pilihan publik adalah sebuah perspektif untuk bidang sosial politik yang muncul dari pengembangan dan penerapan perangkat metode ilmu ekonomi. Buchanan mengulas pilihan publik ini dari dua aspek:

1. Pendekatan *catallaxy*, Ekonomi sebagai ilmu pertukaran. Para pelaku politik menawarkan berbagai kebijakan publik kepada masyarakat (*supply*). Pembeli kebijakan publik ini adalah masyarakat pemilih yang akan memilih kebijakan yang benar-benar dapat mewakili kebutuhan mereka. (*demand*).
2. *Homo economicus* (Konsep manusia ekonomi) konsep ini menjelaskan bahwa manusia cenderung memaksimalkan manfaat utilitas untuk dirinya karena dihadapkan kelangkaan sumber daya. Maksimalisasi utilitas berlaku terhadap *self choice* (pilihan individu). Dalam pasar politik, politisi sebagai pelaku memaksimalkan utilitas agar dipilih kembali melalui kebijakan dan program yang dilaksanakan bagi wilayah pemilihnya. Politisi sebagai pelaku memaksimalkan kepuasan pribadi yang dimotivasi oleh banyak faktor seperti gaji, reputasi publik, kekuasaan dan ruang untuk mengontrol birokrasi. Sementara para pemilih akan mengontrol suara untuk mendapatkan kebijakan yang diinginkan.

Berdasarkan kedua aspek utama dalam kajian teori pilihan publik, dapat diposisikan sebagai pemasok (*supplier*) adalah politisi, partai politik, birokrasi dan pemerintah. Sedang sebagai peminta (*demanders*) adalah pemilih (*voters*).¹¹

Pendekatan ini bisa berdimensi teoritis tetapi juga mempunyai preskripsi aplikasi sehingga bisa menjadi referensi kebijakan publik atau bahan yang bermanfaat di dunia akademis. *Public choice* bisa dipakai untuk menunjukkan bagaimana sikap (*behaviour*), yang diinterpretasikan sesuai medium budaya dan ideologi yang ada dan sangat mudah diterangkan sebagai ekspresi dan persepsi individu terhadap kepentingannya. Pendekatan ini juga bisa digunakan untuk mengiluminasikan kondisi keberhasilan tindakan kolektif dan untuk menunjukkan mengapa sebagian kepentingan bisa lebih diagregasikan dan sebagian lainnya tidak. Dengan pendekatan pilihan publik tidak ada lagi sekat-sekat pemisah antara ekonomi dan politik, antara pasar dan pemerintah, antara pribadi dan masyarakat publik. Dalam model pilihan publik, ekonomi diperluas mencakup politik, pasar diperluas mencakup pemerintah, dan pribadi.¹²

¹¹ Moloeng, Lexy J. *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: Remaja Rosdakarya, 2004.

¹² Karjuni Dt. Maani, "Pergulatan Antara Ekonomi Dan Politik Dalam Perspektif *Public Choice*" Vol. IX No. 2 Th. 2013.

2.2 Penelitian Terdahulu

Berikut ini yaitu beberapa penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti lain, diantaranya :

1. Kemitraan Pemerintah Dan Swasta Dalam Pengelolaan Sampah Di Kota Makassar. Oleh M. Febri Zulkarnain Prodi Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Hasanuddin, 2017. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif, dengan menggunakan konsep *governance* dan kemitraan, teori *democratic citizenship* oleh Denhardt. Teori tersebut mendorong pemerintah untuk memaksimalkan nilai partisipasi dan kemitraan baru (*new partnership*) kepada implementasi kebijakan publik.
Hasil dari penelitian ini adalah pelaksanaan kemitraan pemerintah dan swasta dalam pengelolaan sampah di kota Makassar telah sesuai dengan ketentuan Memorandum of Agreement No. MOA/05/XII.17/GKI/2007 tentang kerjasama investasi proyek Clean Development Mechanism (CDM) pembakaran landfill Gas (LFG) di TPA Tamangapa Kota Makassar. Tidak berlanjutnya proses kemitraan pemerintah dengan PT.Gikoko Kogyo Indonesia terkait proyek Clean Development Mechanism (CDM) terhenti sehingga meningkat kembali intensitas sampah di kota Makassar.
2. Kemitraan Pemerintah Swasta Dan Masyarakat Dalam Mewujudkan Ketahanan Pangan Dan Kesejahteraan Petani Dalam Mewujudkan

Ketahanan Pangan Dan Kesejahteraan Petani (Studi pada Kemitraan PT.Pertani (Persero) dan Petani Mitra di Desa Tulungrejo Kecamatan Ngantang Kabupaten Malang). Oleh Redy Kesuma, Imam Hanafi, Trisnawati. Prodi Adminstari public Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya Malang. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan menggunakan teori *governance* oleh Sumarto dan teori kemitraan oleh Martodireso. Hasil penelitian ini adalah, bahwa kemitraan yang terjalin antara pemerintah, BUMN pelaksana dan masyarakat melalui melalui program kemitraan GP3K di desa tulungrejo kecamatan Ngantang Kabupaten Malang telah memberikan berbagai dampak positif, mulai dari petani dengan meningkatnya kesejahteraan melalui produksi pertanian yang bertambah, PT Petani (Persero) dengan keuntungan penjualan yang meningkat, hingga pemerintah dengan terpenuhinya pasokan pangan nasional serta tercapainya target yang telah ditetapkan.

3. Efektivitas Kemitraan Pemerintah Dan Swasta Dalam Upaya Penanggulangan Kemiskinan: Sebuah Tinjauan Literatur. Oleh Didi Rasdi Dan Teguh Kurniawan, Prodi Ilmu Administrasi, Universitas Indonesia, Depok. Penelitian ini menggunakan metode Analisis pada jurnal, buku, maupun berita dengan konsep *public-private partnership*. Hasil dari penelitian ini adalah menyimpulkan bahwa salah satu alternatif yang dapat dilakukan untuk menanggulangi kemiskinan yaitu

dengan melakukan kemitraan antara pemerintah dan swasta (public-private partnership). Pada dasarnya, kemitraan yang dilakukan antara pemerintah dan swasta berdampak pada efektivitas upaya penanggulangan kemiskinan, meskipun berbagai permasalahan dan kendala kerap ditemui dalam pelaksanaan kemitraan tersebut. Kendala yang ditemui berupa ketiadaan tujuan yang jelas maupun potensi kerugian lainnya. Kemitraan yang dilakukan pun didasarkan karena pemerintah mempunyai berbagai keterbatasan dalam memecahkan permasalahan yang semakin beragam. Keterbatasan tersebut berupa anggaran, sumberdaya, teknologi dan lain sebagainya. Dengan demikian, pemerintah melakukan kerjasama dengan sektor lain terutama sektor swasta. Kerjasama tersebut tentunya mempunyai tujuan yang spesifik.

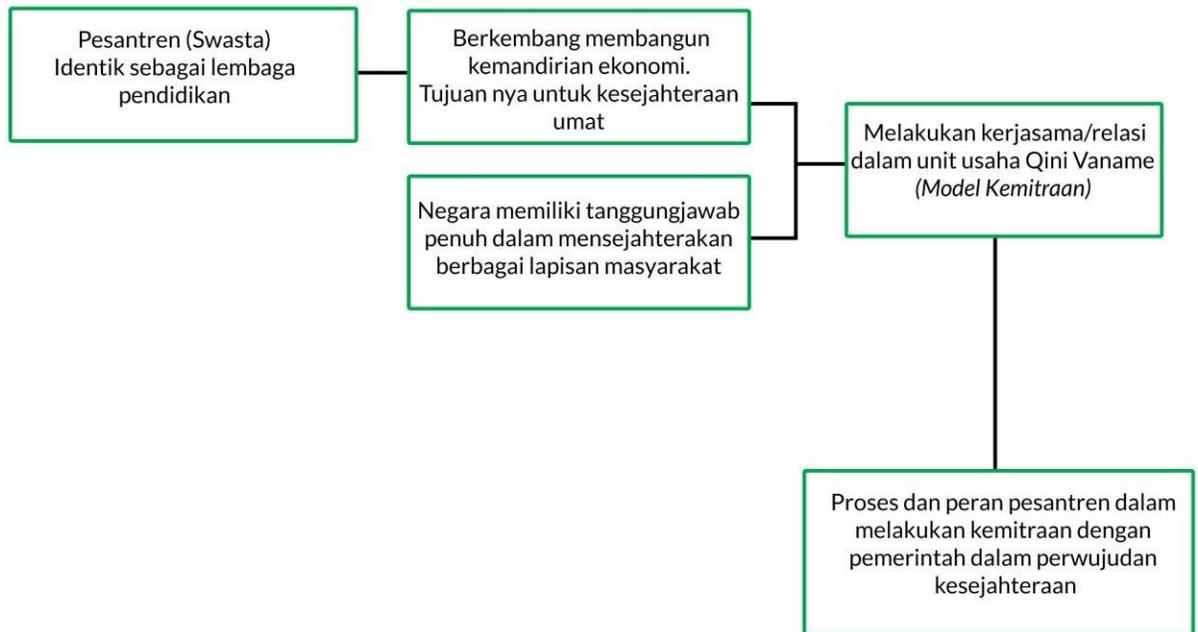
Tabel 2.3

Tabel Persamaan Dan Perbedaan Penelitian Terdahulu

Nama Peneliti	Perbedaan	Persamaan	Hasil Penelitian
<p>M. Febri Zulkarnain Prodi Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Hasanuddin</p>	<p>Objek penelitian pengelolaan sampah di kota Makasar</p>	<p>Sama-sama mengkaji mengenai kemitraan pemerintah dan swasta.</p>	<p>Dengan adanya proses kemitraan pemerintah dan swasta mampu mewujudkan terlaksananya penanganan sampah di kota Makassar. Ini di tunjukkan ketika proses kemitraan terhenti, intensitas sampah kembali meningkat. Hal ini menunjukkan bahwa pemerintah memerlukan proses kemitraan.</p>
<p>Redy Kesuma, Imam Hanafi, Trisnawati. Prodi Adminstari public Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya Malang</p>	<p>Objek penelitian Kemitraan Pemerintah Swasta Dan Masyarakat Dalam Mewujudkan Ketahanan Pangan Dan Kesejahteraan Petani Dalam Mewujudkan</p>	<p>Sama-sama mengkaji kemitraan pemerintah dan swasta, juga bertujuan dalam mencapai kesejahteraan masyarakat.</p>	<p>Proses kemitraan pemerintah dan swasta telah memberikan berbagai dampak positif, mulai dari petani dengan meningkatnya kesejahteraan melalui produksi pertanian yang bertambah, PT Petani</p>

	<p>Ketahanan Pangan Dan Kesejahteraan Petani (Studi pada Kemitraan PT.Pertani (Persero) dan Petani Mitra di Desa Tulungrejo Kecamatan Ngantang Kabupaten Malang)</p>		<p>(Persero) dengan keuntungan penjualan yang meningkat, hingga pemerintah dengan terpenuhinya pasokan pangan nasional serta tercapainya target yang telah ditetapkan.</p>
<p>Didi Rasdi Dan Teguh Kurniawan. Prodi Ilmu Administrasi Universitas Indonesia, Depok.</p>	<p>Objek penelitian mengkaji kemitraan antara pemerintah dan swasta dalam efektivitas penanganan keiskinan dengan metode analisis pada jurnal, buku, maupun berita.</p>	<p>Sama-sama mengkaji mengenai kemitraan antara pemerintah dan swasta juga tujuannya sama-sama untuk mengatasi kemiskinan/ kesejahteraan masyarakat.</p>	<p>Menghasilkan deskripsi pentingnya bermitra untuk mencapai tujuan secara efektif.</p>

2.3 Kerangka Pemikiran



Penelitian ini dibangun atas alur kerangka pemikiran yang berawal dari kemandirian pesantren dalam membangun ekonomi khususnya dalam bidang tambak udang hingga mampu mengelola usaha ini secara mandiri. Kemudian dalam perkembangannya unit usaha ini diperkuat dengan adanya pinjaman modal oleh pemerintah sebagai bentuk hadirnya peran pemerintah dalam menjalankan tugasnya untuk menjamin kesejahteraan masyarakat, sehingga pemerintah dalam usaha ini hadir sebagai mitra pesantren dalam membantu mengembangkan usahanya. Kerjasama tersebut terjalin dalam rangka meningkatkan kapasitas dan kapabilitas di suatu bidang usaha tertentu, atau tujuan tertentu, sehingga dapat memperoleh hasil yang lebih baik, kemitraan ini juga diyakini dapat mencapai suatu tujuan dengan lebih baik karena adanya pembagian fungsi dan peran di antara dua belah pihak. Peran pemerintah dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat sejalan dengan sebuah teori pilihan publik yang digunakan oleh peneliti sebagai pendekatan dalam penelitian ini dimana dalam teori pilihan publik yang juga sebagai penghubung antara ilmu politik dengan ilmu ekonomi menjelaskan bahwa pemasok (*supplier*) adalah politisi, partai politik, birokrasi dan pemerintah. Sedang sebagai peminta (*demand*) adalah pemilih (*voters*). Juga dalam penelitian ini peneliti menggunakan teori model kemitraan oleh Sulistiyani Ambar Teguh.

. Maka dalam kasus ini peneliti ingin melihat bagaimana proses peran dari pesantren dalam melakukan kemitraan yang dilakukan antara pesantren dan

negara yang bertujuan untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat melalui unit usaha budidaya tambak udang Qini Vaname.